

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi politik yang dilancarkan pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan kekuasaan rezim orde baru yang sentralistik digantikan dengan pemerintahan yang desentralistik. Kebebasan dan demokrasi dalam arti sebenarnya yang telah dikungkung dan dipasung sekian lama mulai dihidupkan kembali. Kini Pemerintah yang desentralistik telah menerapkan azas demokrasi diikuti oleh pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah. Otonomi daerah dilancarkan sejak 1 Januari 2001. Daerah-daerah otonomi (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Seperti yang tertera pada pasal: 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah: “Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

---

<sup>1</sup> Adisasmata Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.1

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>2</sup>

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya penjelasan diatas dapat diketahui bahwa daerah diberikan hak otonom oleh pemerintah untuk mengurus kepentingannya sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Adapun penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> Antonius Bungaran.S, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013),hml.56

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan orde baru dengan konsep pembangunan, karena itu pemerintah mengambil peran sebagai agen utama dari pembangunan nasional. Salah satunya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.<sup>4</sup>

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis,

---

<sup>3</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah – Edisi. 4.* (Jakarta: Salemba Empat, 2014). h.4

<sup>4</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah....*, 7

terutama semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

*Good governance* merupakan isu yang penting sampai saat ini dalam pengelolaan administrasi publik. Karena dalam kacamata awam, pemerintah yang baik identik dengan pemerintahan yang mampu memberikan pendidikan gratis, membuka banyak lapangan kerja, mengayomi fakir miskin, menyediakan sembako murah, memberikan iklim investasi yang kondusif, dan bermacam-macam kebaikan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum yang berkualitas merupakan ukuran untuk menilai pemerintahan yang baik, sedangkan pelayanan umum yang buruk dapat mencerminkan pemerintahan yang miskin inovasi dan tidak memiliki keinginan untuk mensejahterkan masyarakatnya (bed governance).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ilham Dy Satria, Heny Puspita Sari, "Pengaruh Wealth, Intergovernmental revenue, Leverage dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", (*Jurnal Akutansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Malikussalah*), AT-TASYRI' : VOL. X. No 1, Januari-Juni 2018.

<sup>6</sup> Ismatullah Deddy, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.188

Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*<sup>7</sup>, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menentukan kemandirian suatu daerah sehingga upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktifitas operational pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui dana perimbangan.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan sendiri dituangkan dalam APBD dengan begitu dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang di

---

<sup>7</sup> Outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek.

pungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Karena itu standar Akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Tanpa adanya pedoman, laporan keuangan yang dihasilkan, tidak akan berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Di dalam Islam dilarang melakukan satu hal tanpa adanya pengetahuan maupun landasan hukum tentangnya. Seperti pernyataan di dalam Alquran surat al-Isra ayat

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Artinya “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Bekaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga akan terciptana tata kelola pemerintahan yang baik dan adanya evaluasi

berkala atas apa yang telah dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. menurut mardiasmo (2004) inti dari pengukuran kinerja dari organisasi pemerintah daerah adalah value for monay. Itu merupakan konsep pendekatan kinerja, yang biasanya dinyatakan dengan ukuran tingkat ekonomis, efisien dan efektivitas.

Menteri dalam negeri Gunawan Fauzi mengatakan, otonomi daerah bertujuan untuk mengutamakan pada sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektifitas otonom daerah.

Fakta itu menunjukkan bahwa masih rendahnya nilai kerja keuangan pemerintah daerah di Banten. Filosofi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pegawai. Oleh karena itu efektivitas dan efisiensi keuangan harus jeas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Untuk mengetahui seberapa efisien kinerja pemda di kabupaten/kota di Banten setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan di Banten**  
**Tahun Anggaran 2014-2015**

NAMA DAERAH	EFISIENSI	KETERANGAN
LEBAK	93%	Kurang efisien
KAB. PANDEGLANG	86%	Cukup efiseien
KAB. SERANG	80%	Cukup efiseien
KAB. TANGERANG	80%	Cukup efiseien
KOTA SERANG	87%	Cukup efiseien
KOTA CILEGON	78%	Efisien
KOTA TANGERANG	75%	Efisien
KOTA TANGSEL	89%	Cukup Efisien

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota  
Provinsi Banten 2014*

**Tahun Anggaran 2015-2016**

NAMA DAERAH	EFISIENSI	KETERANGAN
LEBAK	89%	Cukup Efisien
KAB. PANDEGLANG	88%	Cukup Efisien
KAB. SERANG	84%	Cukup Efisien
KAB. TANGERANG	82%	Cukup Efisien
KOTA SERANG	85%	Cukup Efisien
KOTA CILEGON	83%	Cukup Efisien
KOTA TANGERANG	73%	Efisien
KOTA TANGSEL	78%	Efisien

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota  
Provinsi Banten 2015*

### Tahun Anggaran 2016-2017

NAMA DAERAH	EFISIENSI	KETERANGAN
LEBAK	90%	Cuku Efisien
KAB. PANDEGLANG	89%	Cukup Efisien
KAB. SERANG	87%	Cukup Efisien
KAB. TANGERANG	100%	Tidak Efisien
KOTA SERANG	86%	Cukup Efisien
KOTA CILEGON	89%	Cukup Efisien
KOTA TANGERANG	81%	Cukup Efisien
KOTA TANGSEL	85%	Cukup Efisien

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Banten 2014*

### Tahun Anggaran 2017-2018

NAMA DAERAH	EFISIENSI	KETERANGAN
LEBAK	94%	Kurang Efisien
KAB. PANDEGLANG	93%	Kurang Efisien
KAB. SERANG	87%	Cukup Efisien
KAB. TANGERANG	100%	Tidak Efisien
KOTA SERANG	94%	Kurang Efisien
KOTA CILEGON	92%	Kurang Efisien
KOTA TANGERANG	81%	Cukup Efisien
KOTA TANGSEL	84%	Cukup Efisien

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Banten 2014*

### Tahun Anggaran 2018-2019

NAMA DAERAH	EFISIENSI	KETERANGAN
LEBAK	91%	Kurang Efisien
KAB. PANDEGLANG	96%	Kurang Efisien
KAB. SERANG	90%	Cukup Efisien
KAB. TANGERANG	89%	Cukup Efisien
KOTA SERANG	92%	Tidak Efisien
KOTA CILEGON	89%	Cukup Efisien
KOTA TANGERANG	88%	Cukup Efisien
KOTA TANGSEL	88%	Cukup Efisien

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Banten 2014*

Menurut Halim (2012) kinerja keuangan dapat diukur dengan perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain membandingkan, pengukuran kinerja juga dapat menggunakan enam rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage rasio*, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah *size* pemerintah daerah, *leverage* dan *intergovernmental revenue* (Sumarjo, 2010). Faktor lainnya yaitu ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan jumlah belanja daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013).

Alasan mendasar penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah *wealth* dan *intergovernmental revenue* mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur melalui besar kecilnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang didapat oleh pemerintah daerah tersebut. Adapun alasan yang lain untuk membandingkan hasil penelitian yang telah diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga yang mana hasil yang telah didapatkan sebelumnya memiliki hasil yang tidak konsisten seperti hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Minarsih (2015) *size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. sedangkan *size*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* (Sumarjo, 2010) serta *Wealth* (kemakmuran) pada penelitian Dyah Ayuningtyas (2016) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Alasan lain untuk

mengambil penelitian ini karena penelitian sebelumnya terjadi di Provinsi Jawa Tengah maka penelitian kali ini akan dilakukan di Banten. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *wealth* yang diporsikan dengan pendapatan asli daerah dan *intergovernmental revenue* yang diporsikan dengan dana perimbangan dan total pendapatan. Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik dan akuntansi disektor pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap periodenya guna memperbaiki kinerja diperiode mendatang.

Maka dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah di Banten. Maka dari itu peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Wealth* dan *Intergovermentar Revenue* Terhadap Efisiensi Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Di Banten Tahun 2014-2018**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada daerah otonomi yang belum berjalan dengan baik.
2. Raelisasi APBD yang mengalami peningkatan tiap tahunnya belum diketahui apakah lebih dinikmati oleh belanja pegawai atau dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Diperlukannya pengukuran kinerja atas pencapaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai evaluasi berkala untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis membatasi permasalahannya hanya pada *wealth* (kemakmuran), *intergovermantel revenue* dan kinerja keuangan pemerintah di Banten.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakemakmuran (*Wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten?
2. Bagaimana *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten?

3. Bagaimana pengaruh *wealth* dan *intergovernmental revenue* secara bersamaan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh *wealth* terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten.
2. Untuk menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten.
3. Untuk menganalisis pengaruh *wealth* dan *intergovernmental revenue* secara bersamaan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Banten.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Peneliti  
Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Banten
2. Untuk Akademisi  
Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif, atau bahkan gabungan keduanya.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan pada era desentralisasi ini masyarakat harus andil dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya agar pendapatan yang berasal dari daerah atau kekayaan daerahnya meningkat, guna melaksanakan pembangunan yang lebih pesat menjadikan daerah yang berkembang dan semandiri mungkin. Seperti yang dikatakan H.A.W. Widjaya dalam bukunya:

Kita tampaknya akan bersepakat bahwa perlu kerja keras semua pihak untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia karena kita

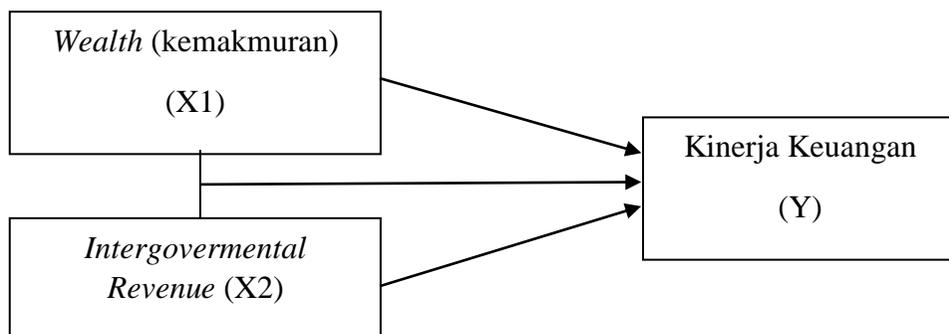
tidak ingin eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), sebagai akibat otonomi tetap memposisikan masyarakat daerah sebagai penonton dipinggir lapangan, sementara oranglain memperebutkan kekayaan alamnya. Masyarakat jangan menjadi asing atau tersaing di daerahnya sendiri. Masyarakat harus menjadi “tuan rumah” di rumahnya sendiri.<sup>8</sup>

Dengan adanya undang-undang no 23 tahun 2004 tentang otonomi daerah, setiap daerah harus mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *wealth* (kemakmuran) yang diukur menggunakan PAD dan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *wealth* dan *intergovernmental revenue* yang diduga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini:

---

<sup>8</sup> Wijaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi* –Ed. 1-6 (Jakarta: RajawaliPers,2011). 79



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

1. Pengaruh (*wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

*Wealth* atau kemakmuran suatu daerah bisa dilihat dari tingkat kekayaan daerah tersebut. Kekayaan yang dimaksud merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya. Tingkat kekayaan daerah dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah maka itu memperlihatkan kemandirian suatu daerah dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>9</sup> Semakin besar pendapatan asli

---

<sup>9</sup>Dhika augustyas, "Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cermin Ekonomi Daerah", <https://dhasitsme.wordpress.com/2013/06/30/>, diakses pada 31 Okt. 2019, pukul 15.00 WIB

daerah yang dimiliki pemerintah daerah seharusnya pemerintah daerah tersebut mempunyai dana yang besar dalam melaksanakan tupoksinya. Atas dasar itu semakin besar PAD seharusnya kinerja keuangan pemerintah akan lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Prasasti dan Purnamasari (2017), Puspita (2018) yang menyatakan bahwa terdapat berpengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan kinerja keuangan daerah, artinya semakin besar total Pendapatan Asli Daerah maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja karena masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat atas pajak dan retribusi.<sup>10</sup>

## 2. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

*Intergovernmental revenue* di Indonesia biasa dikenal dengan dana perimbangan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat saat ini masih sangat besar. Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Nur Iim, Nunuy Nur, Arie Pratama, “Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”, (Jurnal SIKAP Vol 3 | No 2| 2019), h.150.

semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.<sup>11</sup>

## H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka diperoleh hipotesisi sebagai berikut:

H<sup>1</sup>: *Wealth* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Banten

H<sup>2</sup>: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Banten.

H<sup>3</sup>: *Wealth* dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Banten.

---

<sup>11</sup> Kuswardani media, "Pengaruh Siza, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia" (Program Sarjana, UNNES "Universitas Negeri Semarang" 2012), h. 36-37.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah dan kerangka berfikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan analisis data sebagai interpretasi hasil analisis, dan terakhir pembahasan hasil analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab kelima adalah penutu, yang terdiri atas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.